

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN KEBIJAKAN SISTEM PENGAWASAN TERHADAP EFEKTIFITAS KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INSPEKTORAT KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

**ABIZAR ALGHIFARI**

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, perwujudan good governance (pemerintahan yang baik) merupakan amanat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sebagai salah satu unsur manajemen pemerintah, disamping perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan memegang peranan penting untuk terciptanya kinerja pemerintah yang baik. Sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Pasal 24 tentang pengawasan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, menyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan aparat pengawas Internal pemerintah daerah.

Inspektorat Kota Bandar Lampung selaku pengawas internal pemerintah kota memiliki tugas, fungsi, serta sistem pengawasan dalam melaksanakan keberadaannya sebagai lembaga pengawasan. Agar tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik maka sistem pengawasan yang berlaku haruslah efektif.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pelaksanaan sistem pengawasan terhadap efektifitas kinerja pegawai negeri sipil di Inspektorat Kota Bandar Lampung serta faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif empiris, yaitu identifikasi dan deskripsi hukum positif. Tidak saja mengacu pada norma-norma hukum secara normatif, tetapi juga melihat implementasi di lapangan secara empiris.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa sistem kebijakan pengawasan Inspektorat Kota Bandar Lampung telah berhasil efektif meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil di Inspektorat Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Meskipun demikian, masih terdapat faktor penghambat yang berupa kurangnya tenaga berkeahlian, lemahnya koordinasi, minimnya dana, sarana dan prasarana, serta lemahnya kesadaran untuk melaksanakan tindak lanjut hasil temuan pengawasan.